

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanggung jawab yang besar dimiliki pemerintah Republik Indonesia terhadap wilayah dan rakyatnya dalam cita-cita dan pencapaian tujuan negara. Pemerintah perlu mengupayakan segala cara supaya tujuan negara tercapai. Tujuan negara tersebut tertuang di dalam alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. . . .

Negara memiliki tanggung jawab yang besar keberlangsungan hidup masyarakat, salah satunya adalah kesejahteraan umum. Rizki Afri Mulia & Nika Saputra (2020) menguraikan definisi kesejahteraan sebagai berikut: “Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. . . .” (p. 68). Bagi Republik Indonesia Kesejahteraan umum juga menjadi cita-cita negara yang perlu diusahakan oleh pemerintah Indonesia sehingga kesejahteraan umum dapat tercapai.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kesejahteraan umum menjadi impian serta kebutuhan bagi masyarakat Indonesia dan hal ini perlu dipenuhi oleh pemerintah. Kesejahteraan umum dapat dicapai melalui pemenuhan berbagai faktor, antara lain dengan terpenuhinya pelayanan publik, dan sarana prasarana yang memadai. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah perlu melakukan berbagai cara dan upaya, salah satunya melalui pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh perangkat pemerintah baik yang berada di pusat maupun di daerah dengan sumber dana yang digunakan bersumber dari APBN/APBD dimana prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, dan diakhiri dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang/jasa memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan negara, karena pengadaan barang/jasa didanai oleh APBN/APBD yang mana APBN/APBD merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara/daerah yang memiliki kegunaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah memiliki tujuan seperti yang disebutkan dalam pasal 4 Perpres 16 Tahun 2018 jo. Perpres 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan; meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha

Menengah; meningkatkan peran pelaku usaha nasional; mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian; meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; mendorong pemerataan ekonomi; dan mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Kodiklat TNI AD), merupakan komando utama pembinaan TNI AD yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Kodiklat TNI AD berlokasi di Bandung tepatnya terletak di Jl. Aceh No.50, Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40113. Kodiklat TNI AD memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan doktrin/sistem operasi matra darat, pendidikan dan latihan di jajaran satuan TNI AD, dalam memenuhi tugas pokok tersebut Kodiklat TNI AD memiliki fungsi utama antara lain pembinaan doktrin, pembinaan Pendidikan, dan pembinaan latihan. Dalam menjalankan tugasnya diperlukan berbagai macam fasilitas dan penunjang, salah satunya melalui pengadaan *e-book*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan peninjauan untuk mengetahui apakah proses pengadaan barang berupa *e-book* yang dilaksanakan pada Dirdok Kodiklatad sudah sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 jo. Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hasil tinjauan tersebut akan diuraikan pada karya tulis tugas akhir yang berjudul “Analisis Atas Pengadaan *E-Book* Pada Markas Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan Dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kota Bandung Tahun Anggaran 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis Menyusun rumusan masalah yang menjadi dasar penulisan karya tulis tugas akhir (KTTA), sebagai berikut:

- a. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan pengadaan *e-book* yang dilaksanakan di Kodiklat TNI AD disesuaikan dengan peraturan yang berlaku?
- b. Apakah terdapat kendala selama proses pengadaan *e-book* pada Kodiklat TNI AD?
- c. Bagaimana solusi dalam menyelesaikan kendala pada pengadaan *e-book* di Kodiklat TNI AD?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang diharapkan atas penulisan karya tulis ini yakni:

- a. Menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengadaan *e-book* yang dilaksanakan di Kodiklat TNI AD,
- b. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul selama pelaksanaan pengadaan *e-book* di Kodiklat TNI AD,
- c. Menganalisis solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala yang muncul selama pelaksanaan pengadaan *e-book* di Kodiklat TNI AD.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis akan berfokus pada proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Kodiklat TNI AD Kota Bandung. Khususnya dalam pengadaan *e-book* melalui metode pengadaan langsung pada tahun anggaran 2021 di satuan Kodiklat TNI AD Kota Bandung. Penulis akan meninjau pelaksanaan PBJ pemerintah melalui metode langsung disesuaikan dengan Perpres 12 tahun 2021

tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan peraturan terkait yang berlaku. Penulis akan mengamati kendala yang terdapat selama proses pengadaan dan menganalisis untuk mendapatkan solusi untuk kemudian dipaparkan dalam karya tulis tugas akhir ini.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya tulis ini diharapkan memberikan manfaat untuk:

- a. Memberi wawasan tambahan bagi penulis dan pembaca mengenai pelaksanaan PBJP yang sesuai dengan produk hukum yang berlaku.
- b. Menambah informasi terkait PBJP bagi instansi dalam rangka pengembangan proses pengadaan barang jasa yang dilakukan, khususnya Kodiklatad yang menjadi objek penelitian.
- c. Penelitian selanjutnya terkait pengadaan barang jasa pemerintah.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Karya tulis tugas akhir ini akan dibagi kedalam bab-bab dan setiap bab terbagi kedalam subbab-bab dengan susuna yang akan dibentuk sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan bagian awal dari sebuah karya tulis. Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum dari keseluruhan KTTA. Bab ini terdiri atas latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data, dan manfaat penulisan yang diuraikan kedalam subbab masing-masing.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini menjelaskan teori, ketentuan, dan/atau penelitian terdahulu yang relevan dengan topik karya tulis tugas akhir ini yakni pengadaan barang jasa pemerintah. Dalam bab ini diuraikan pengertian, prinsip, kebijakan, tata cara dan hal-hal lain terkait pengadaan barang jasa pemerintah. Bab ini menjadi landasan bagi penulis dalam melakukan penelitian dan penelaahan terhadap data yang diamati.

BAB III METODE PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdiri atas bagian metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian menjelaskan metode yang digunakan penulis dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data, bagian gambaran umum objek penelitian berisi profil, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi atas objek yang dipilih oleh penulis yakni Kodiklat AD Kota Bandung, dan bagian pembahasan hasil penelitian berisi pembahasan hasil pengolahan dan penelaahan data yang didapat dari tinjauan yang dilakukan terhadap objek karya tulis tugas akhir.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan penekanan atas hasil penelitian yang disimpulkan dari uraian bab-bab sebelumnya. Bab ini merupakan bagian akhir dari karya tulis ini.